BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di masa sekarang permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia semakin beragam. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Diantara isu-isu yang dihadapi oleh banyak negara di dunia tersebut isu ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat sensitif dikarenakan aktivitasnya tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa serta kegiatan ekonomi lainnya tetapi menyangkut hubungan politis negara (*Government to Government*) sebagai aktor yang terlibat. Sektor ekonomi-politik akan selalu menjadi peran dalam kerjasama diantara dua negara, karena menyangkut kepentingan yang bersifat khusus dari setiap negara. Oleh karena itu ekonomi politik menjadi pusat perhatian karena kewajiban dan prioritas negara yang utama adalah mensejahterakan rakyatnya (www.sejarah-negara.com/peran-indonesia-dalam-kerja-sama-dan-hubungan-internasional diakses pada 2 Oktober 2016 pukul 17.25).

Dikarenakan semakin beragamnya kebutuhan hampir tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhinya sendiri. Sehingga hal yang lazim terjadi adalah adanya kerjasama antar negara baik dengan negara sekitar, negara dalam satu kawasan, maupun negara yang ada di belahan bumi lainnya. Salah satu penerapannya adalah kerjasama perdagangan regional negara Australia dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan menengah di kawasan Asia Pasifik, Australia memiliki sejarah dan

hubungan luar negeri yang dinamis dan kompleks terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki arti yang penting bagi Australia dalam berbagai aspek termasuk politik, keamanan, perdagangan, pendidikan dan industri. Hubungan antara *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan Australia dalam aspek perdagangan maupun kerja sama ekonomi lainnya telah menempuh sebuah proses evolusi yang panjang dan sangat menarik untuk kemudian dipelajari (www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB08_ASEAN.html diakses pada 9 November 2016 pukul 07.41).

Berbeda dengan aspek politik dan keamanan, hubungan ASEAN-Australia dalam aspek ekonomi telah menempuh beberapa tahap proses pendekatan yang relatif kompleks dan beragam. Menarik untuk dilihat bahwa bagi Australia awal hubungan dengan ASEAN cenderung berfokus pada aspek politik dan keamanan. Adanya upaya membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara menjadikan hubungan ASEAN dan Australia memiliki peran yang semakin penting untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pada masa awal pendirian ASEAN di akhir tahun 1960-an, Australia memandang perlunya pendampingan pembangunan ekonomi dalam kawasan sebagai instrumen membendung pengaruh komunisme yang datang dari utara jika dibandingkan membuka akses ASEAN bagi interaksi perdagangan (www.indonesian.irib.ir/international/asia-dan-pasifk/item/110482-australia-serius-perkokoh-kerjasama-dengan-asean diakses pada 8 November 2016 pukul 22.21).

Pada November 1993 mantan Wakil Perdana Menteri Thailand, Mr Supachai mengajukan sebuah usulan dalam Konferensi Nasional Peninjauan

Perdagangan dan Investasi di Melbourne Australia untuk menjelajahi prospek penyatuan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *Australia-New Zealand Closer Economic Relation Trade Agreement* (ANZCERTA). Usulan ini kemudian ditindaklanjuti melalui sebuah laporan peninjauan di Australia pada tahun 2000 yang berjudul "*The Angkor Agenda*". Yang dibuat dalam rangka realisasi penyatuan formasi AFTA dan ANZCERTA ini. Laporan ini menyimpulkan bahwa pembuatan kawasan perdagangan bebas antara *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan ANZCERTA sangat diperlukan jika kedua belah pihak ingin mengikuti laju pembangunan global dewasa ini. Laporan ini juga dibuat dalam rangka menangkal isu-isu global kontemporer pada saat itu seperti krisis ekonomi di kawasan Asia Timur pada 1997-1998, meningkatnya urgensi terhadap tantangan negara-negara *new emerging market* Cina dan India, globalisasi *Free Trade Agreements* yang sangat cepat, serta kegagalan *World Trade Organization* (WTO) *ministrial meeting* di Seattle pada 1999 dalam menghasilkan *WTO Round* yang baru (www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/angkor-agenda.pdf diakses pada 12 Desember 2016 pukul 18.00).

Dalam berbagai alasan proposal AFTA-CER awalnya tidak diterima, namun pada September 2002 karena suatu pertimbangan perlunya sebuah kawasan perdagangan yang merata artinya tidak saling mendominasi, usulan *AFTA-CER Closer Economic Partnership* (CEP) kemudian diterima dan diresmikan. Bertujuan untuk memperdalam tingkat integrasi ekonomi Australia-Selandia Baru dan negara-negara di kawasan ASEAN melalui program yang berpusat pada fasilitasi perdagangan serta peningkatan kapasitas. Selanjutnya

pada April 2004, ASEAN mengindikasikan keinginannya dalam meningkatkan kerangka kerja CEP. Hal ini menghasilkan negosiasi tingkat kepala negara dalam *Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit* pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos. Yang kemudian di dalamnya tertuang kesepakatan *Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area* (www.dfat.gov.au/fta/aanzfta/aust_guide_whole.pdf diakses pada 12 Desember 2016 pukul 18.05).

Para kepala negara ketiga belah pihak setuju untuk berpatokan pada kesepakatan dalam negosiasi-negosiasi selanjutnya. kesepakatan ini membantu ketiga belah pihak dalam menghasilkan persetujuan yang mencakup: *goods, services and investments, progressive elimination of all forms of barriers to trade and investments*. Dilanjutkan dengan proses negosiasi *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) yang dimulai pada awal tahun 2005, setelah melalui 15 putaran perundingan persetujuan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Persetujuan AANZFTA terdiri dari 18 bab, 212 pasal dan 4 lampiran yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, *Rules Of Origin, Customs, Sanitary and Phytosanitary Measures, Safeguard*, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan persaingan, *Movements of Natural Persons*, Kerjasama Ekonomi, dan *E-commerce*. Berfokus pada hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam berbagai bidang terus tumbuh dan berkembang dengan baik setiap tahunnya khususnya dalam bidang perdagangan. Indonesia merupakan pasar

penting bagi produk pertanian Australia terutama *Dairy product*, daging sapi dan produk olahannya. Sedangkan impor utama Australia dari Indonesia adalah produk olahan kayu, otomotif, tekstil dan pertambangan. Kemudian pada Februari 2012 AANZFTA akhirnya telah disepakati untuk berlaku di Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN terakhir memberlakukan AANZFTA. Pemberlakuan *Free Tade Area* yang telah berlaku akan membantu memperkuat kerjasama antara Australia dengan Indonesia. Minat Australia terhadap produk kayu asal Indonesia sangat besar mengingat kualitas, baik kayu maupun desain dari Indonesia dipandang sangat baik. Impor Indonesia dari Australia tidak terlalu besar, namun Indonesia semakin bergantung pada impor dari produk pertanian dari Australia terutama dalam sub sektor pertanian dan *Dairy Products* (www.australiaplus.com/indonesian/berita/pm-turnbull-undang-pemimpin-negara-asean-ke-australia/7825560 diakses pada 8 November 2016 pukul 22.35).

Tujuan utama dari dibentuknya AANZFTA sendiri adalah meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang diantara para pihak melalui penghapusan progresif hambatan tarif dan non-tarif secara substansial pada seluruh perdagangan barang diantara para pihak, meliberalisasi perdagangan jasa-jasa diantara para pihak dengan cakupan sektoral yang substansial, memfasilitasi dan mempromosikan serta meningkatkan kesempatan-kesempatan investasi diantara para pihak melalui pengembangan lebih lanjut lingkungan investasi yang layak, menetapkan kerangka kerjasama bagi penguatan, peningkatan ikatan perdagangan, investasi dan ekonomi diantara para pihak, menyediakan perlakuan berbeda dan khusus bagi negara-negara anggota ASEAN terutama bagi negara-negara anggota

ASEAN yang baru guna memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif (www.austlii.edu.au/au/other/dfat/nia/2009/6.html diakses pada 13 Desember 2016 Pukul 1.36).

Sebelum tahun diterapkannya AANZFTA dalam perdagangan Indonesia dan Australia di tahun 2008, menurut laporan atase Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Australia. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Australia periode Januari-Desember 2008 mencapai US$ 10.929,18 juta, yang terdiri dari total ekspor Indonesia ke Australia sebesar US$ 5.840,73 Juta, dan impor Indonesia dari Australia tercatat US$ 5.088,45 juta. Komoditas utama ekspor non-migas Indonesia ke Australia periode yang sama sebagian besar adalah Monitor dan proyektor sebesar US$ 133,69 juta, produk Furnitur sebesar US$ 63,56 juta, produk Kabel sebesar US$ 54,35 juta, peralatan mesin sebesar US$ 32,50 juta. Sedangkan Komoditas utama impor non-migas Indonesia dari Australia dalam periode yang sama antara lain: Alumunium sebesar US$ 380,72 juta, Limbah besi sebesar US$ 128,08 juta, Mineral Seng dan hasil olahan sebesar US$ 71,59 juta (www.kemendag.go.id/id/view/trade-attache-report/311/2008/12 diakses pada 12 November 2016 pukul 19.01).

Masih menurut laporan atase Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Australia Total perdagangan Indonesia dengan Australia periode Januari-September 2009 tercatat US$ 4.835,70 juta. Terdiri dari ekspor Indonesia ke Australia sebesar US$ 2.551,58 juta, dan impor Indonesia dari Australia sebesar US$ 2.284,12 juta. Beberapa komoditi utama ekspor non migas Indonesia ke Australia pada periode yang sama antara lain: Monitor dan proyektor

sebesar US$ 99,11 juta, Perekam Video sebesar US$ 43,19 juta, Ban Karet US$ 29,62 juta, produk Furnitur sebesar US$ 21,21 juta, dan Mesin Cetak sebesar US$ 17,67 juta. Beberapa komoditas utama impor non-migas Indonesia dari Australia selama periode Januari-September 2009 antara lain: emas olahan sebesar US$ 179,20 juta, Produk alas kaki sebesar US$ 15,84 juta, Obat-obatan sebesar US$ 8,33 juta, pakaian sebesar US$ 7,59 juta, Mesin Otomatis dan Unit Pengolahan Data sebesar US$ 4,64 juta (www.kemendag.go.id/id/view/trade-attache-report/311/2009/9 diakses pada 12 Desember 2016 pukul 19.24).

Atase Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Australia melaporkan, total perdagangan Australia dengan Indonesia periode Januari-November 2010 mencapai US$ 8,19 Miliar. Selama periode tersebut ekspor Australia ke Indonesia mencapai US$ 3,78 miliar. Dari jumlah tersebut ekspor non migas Australia ke Indonesia mencapai US$ 3,68 miliar terdiri dari Monitor dan proyektor sebesar US$ 76,11 juta, Perekam Video sebesar US$ 54,19 juta, Ban Karet US$ 24,62 juta, produk Furnitur sebesar US$ 20,21 juta, dan Mesin Cetak sebesar US$ 18,67 juta. Sedangkan impornya dari Indonesia mencapai US$ 4,42 miliar. Impor tersebut terdiri dari non migas sebesar US$ 2,19 miliar yang terdiri dari emas olahan sebesar US$ 189,20 juta, Produk alas kaki sebesar US$ 14,84 juta, Mesin Otomatis dan Unit Pengolahan Data sebesar US$ 6,64 juta (www.kemendag.go.id/id/view/trade-attache-report/311/2010/11 diakses pada 12 Desember 2016 pukul 19.36).

Pasca tahun Indonesia memasuki saat-saat menuju AANZFTA ditahun 2011, Atase Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di

Australia membuat laporan total perdagangan Australia-Indonesia periode Januari-Desember di tahun yang sama mencapai US$ 11.717,06 juta. Terdiri dari ekspor Australia ke Indonesia sebesar US$ 5.618,28 juta. dan impor Australia dari Indonesia sebesar US$ 6.098,78 juta. Beberapa komoditi ekspor Australia ke Indonesia antara lain: Daging hewan segar dan olahannya sebesar US$ 1,21 juta, Susu dan produk dari susu sebesar US$ 1,48 juta. Beberapa komoditi utama impor Australia dari Indonesia, pada periode yang sama mengalami diversifikasi yang cukup signifikan antara lain: Emas dan olahannya sebesar US$ 435,61 juta**,** Kayu dan olahannya sebesar US$ 127,70 juta, Ban karet sebesar US$ 106,38 juta, Perekam video sebesar US$ 55,95 juta, Furnitur sebesar US$ 42,31 juta. Dan di tahun yang sama Pemerintah Australia membuat kebijakan proteksi terhadap industri dalam negerinya dengan mengajukan *Illegal Logging Prohibition Bill 2011* kepada Senat Australia. Yang apabila disetujui menjadi Undang Undang, akan menjadi hambatan akses pasar terhadap kayu dan produk kayu Indonesia di Australia. Karena kayu Indonesia dan produk olahannya dituduh berasal dari hasil penebangan hutan liar Kalimantan termasuk juga dapat mengancam punahnya habitat sejumlah harimau Sumatera (www.kemendag.go.id/id/view/trade-attache-report/311/2011/12 diakses pada 12 Desember 2016 pukul 19.41).

Total perdagangan non migas Australia dengan Indonesia dalam pemantauan ekspor 31 kelompok hasil Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia periode ditahun 2012 mencapai US$ 6,148.502,848 milyar. Terdiri dari ekspor Australia ke Indonesia sebesar US$ 2.877.609.772 milyar dan Impor Australia dari Indonesia sebesar US$ 3.270.893.076 milyar. Beberapa

komoditi ekspor utama Indonesia ke Australia di periode yang sama antara lain: Emas, Perak, Logam Mulia, Perhiasan dan sejenisnya. Sebesar US$ 806.657.484 juta. Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif sebesar US$ 737.722.541 juta, Pengolahan Kayu sebesar US$ 234.964.736 juta. Sedangkan Beberapa komoditi impor utama Indonesia dari Australia di periode yang sama kelompok *food and beverages* menempati posisi atas dengan total perdagangan US$ 465.802.737 juta. Yang jika diuraikan produknya menjadi: Gula lainnya sebesar US$ 135.530.814 juta, Daging hewan segar dan ikutannya sebesar US$ 121.706.192 juta, Susu dan produk dari susu sebesar US$ 148.235.428 juta, Ditahun yang sama Indonesia dan Australia sepakat membuat kebijakan yang dapat dilakukan dalam kerjasama ekonomi secara komprehensif oleh kedua pihak, yaitu mencakup kluster Pertanian seperti sektor *beef and dairy products*, kluster pertambangan seperti tembaga dan batubara, kluster *green economy* seperti minyak kelapa sawit, kluster Jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan dan perhotelan atau pariwisata. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam perdagangan pasar bebas AANZFTA, Indonesia mencoba mendiversifikasi produk perdagangannya sehingga tidak hanya tergantung pada ekspor sumber daya alamnya. Sebagai negara penghasil produk holtikultura, Indonesia berkepentingan membuka pasar-pasar ekspor baru bagi buah-buahan dan sayuran. Australia merupakan pasar potensial karena masyarakatnya menyukai beragam jenis buah dan sayur khas wilayah tropis di Asia dan Pasifik. Namun sejumlah produk buah-buahan seperti salak, mangga dan manggis ternyata masih ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat regulasi *Sanitary dan Phytosanitary* (SPS). Padahal tarif impor untuk buah-

buahan tropis yang diterapkan Australia sudah mencapai nol persen. (www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=311&ekspor=1 diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08.27).

Total perdagangan non migas Australia dengan Indonesia dalam pemantauan ekspor 31 kelompok hasil Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia periode ditahun 2013 mencapai US$ 5.553.633.609 milyar. Terdiri dari ekspor Indonesia ke Australia sebesar US$ 2.892.612.593 milyar dan impor Indonesia dari Australia sebesar US$ 2.661.021.016 milyar. Beberapa komoditi ekspor utama Indonesia ke Australia di periode yang sama antara lain:. Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif sebesar US$ 955.619.827 juta, Emas, Perak, Logam Mulia, Perhiasan dan sejenisnya. Sebesar US$ 203.410.681 juta. Pengolahan Kayu sebesar US$ 224.325.022 juta. Sedangkan beberapa komoditi impor utama Indonesia dari Australia di periode yang sama kelompok *food and beverages* masih menempati posisi atas dengan total perdagangan US$ 763.377.685 juta. Yang jika diuraikan produknya menjadi: Gula lainnya sebesar US$ 341.041.355 juta, Daging hewan segar dan ikutannya sebesar US$ 186.810.346 juta, Susu dan produk dari susu sebesar US$ 166.078.603 juta. Ditahun yang sama Indonesia membuat kebijakan menetapkan kuota impor sapi Australia untuk menstabilkan stok dan harga daging sapi domestik Indonesia (www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=311&impor=1 diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08.27).

Total perdagangan non migas Australia dengan Indonesia dalam pemantauan ekspor 31 kelompok hasil Industri Kementerian Perindustrian

Republik Indonesia periode ditahun 2014 mencapai US$ 6.463.189.556 milyar. Terdiri dari ekspor Indonesia ke Australia sebesar US$ 3.631.285.770 milyar dan impor Indonesia dari Australia sebesar US$ 2.831.903.786 milyar. Beberapa komoditi ekspor utama Indonesia ke Australia di periode yang sama antara lain:. Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif sebesar US$ 1.609.606.372 juta, Tekstil Sebesar US$ 176.771.936 juta. Pengolahan Kayu sebesar US$ 259.453.360 juta. Sedangkan Beberapa komoditi impor utama Indonesia dari Australia di periode yang sama kelompok *food and beverages* masih menempati posisi atas dan mencapai nilai perdagangan tertinggi dengan total nilai perdagangan US$ 1.004.673.914 milyar. Yang jika diuraikan produknya menjadi: Gula dan lainnya sebesar US$ 392.703.833 juta, Daging hewan segar dan olahannya sebesar US$ 330.404.868 juta, Susu dan produk dari susu sebesar US$ 205.498.480 juta. (www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=311&ekspor=1 diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08.27).

Total perdagangan non-migas antara Australia dengan Indonesia di dalam pemantauan ekspor 31 kelompok hasil Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia periode ditahun 2015 mencapai US$ 5.207.786.240 milyar. Terdiri dari ekspor Indonesia ke Australia sebesar US$ 2.924.812.829 milyar dan impor Indonesia dari Australia sebesar US$ 2.282.973.411 milyar. Tiga komoditi ekspor utama Indonesia ke Australia di periode yang sama antara lain: Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif sebesar US$ 1.129.958.112 milyar, Tekstil Sebesar US$ 196.848.159 juta. Pengolahan Kayu sebesar US$ 231.474.320 juta. Sedangkan Beberapa komoditi impor utama Indonesia dari Australia di periode

yang sama kelompok *food and beverages* selalu menempati posisi atas dengan total perdagangan US$ 815.388.002 juta. Yang jika diuraikan produknya menjadi: Gula lainnya sebesar US$ 1.258.937.904 juta, Daging hewan segar dan olahannya sebesar US$ 260.382.558 juta, Susu dan produk dari susu sebesar US$ 54.510.267 juta. Dilihat dari tahun sebelum Indonesia meratifikasi untuk bergabung ke AANZFTA di tahun 2012, terlihat bahwa mayoritas ekspor Indonesia ke Australia berupa alat-alat manufaktur dan sejenisnya, sedangkan impor Indonesia dari Australia mayoritas berupa mineral dan bahan pertambangan sejenis. Namun setelah Indonesia meratifikasi untuk bergabung ke AANZFTA di tahun 2012 terlihat perubahan yang cukup signifikan, masing-masing negara melakukan diversifikasi terhadap produk perdagangan. Australia yang awal mengandalkan ekspor produk mineral dan pertambangan ke Indonesia berubah menjadi kelompok makanan dan minuman, agrikultur, *Dairy Products* dan sejenisnya. Sedangkan Indonesia yang awalnya mengandalkan ekspor produk manufaktur ke Australia berubah menjadi sektor mineral pertambangan, produk hasil olahan kayu hutan dan rotan, tekstil, besi dan baja, serta Mesin otomotif. (www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=311&ekspor=1 diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08.27).

Beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia dalam perdagangan dengan Australia dalam kerangka pasar bebas AANZFTA antara lain:

1. 92.98% ekspor Indonesia ke Australia akan menikmati bea masuk 0% mulai saat *Entry Into Force*.

2. Membentuk *Task Force on Agribusiness Investment* yang akan melakukan *scoping study* untuk *capacity building* di sektor peternakan sapi dan susu.
3. Australia sepakat untuk membahas lebih lanjut usulan Indonesia untuk kemudahan Visa Kerja untuk beberapa profesi, program *capacity building* untuk industri automotif, sertifikasi produk makanan, dan pelatihan serta sertifikasi untuk tenaga pengelas (*welders*).

Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Australia dalam perdagangan dengan Indonesia dalam kerangka pasar bebas AANZFTA antara lain:

1. Peningkatan volume dan struktur perdagangan barang dan jasa maupun investasi Australia serta optimalisasi keuntungan pada sektor perdagangan melalui AANZFTA.
2. Mempererat hubungan politik dan keamanan dengan ASEAN dan Selandia Baru dalam upaya mencapai stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik; serta meningkatkan bargaining position Australia di kawasan Asia-Pasifik dan dalam upaya menguragi potensi konflik dengan ASEAN.
3. Diversifikasi produk perdagangan agar tidak hanya mengandalkan sektor pertambangan sebagai komoditas ekspor.
4. Pembebasan bea masuk untuk *Dairy Product* yang menjadi komoditas ekspor unggulan dalam kesepakatan perdagangan bebas bilateral Indonesia dan Australia (www.bilaterals.org/IMG/pdf/AANZFTA.pdf diakses pada 12 Desember 2016 pukul 19.09).

Keikutsertaan Australia dalam negosiasi AANZFTA merupakan hal yang positif. Disamping itu hal negatif yang turut menjadi perhatian pengambil kebijakan domestik Australia seperti pengalihan tarif barang dari negara non-anggota FTA. Dengan ikut dalam kerjasama ini Australia dalam bidang politik dapat mempererat hubungan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Dalam bidang ekonomi, Australia akan selangkah lebih maju dalam merealisasikan *Single Economic Market* (SEM) di kawasan Asia-Pasifik serta tetap berada dalam jalur putaran WTO (*WTO oriented*). Dalam bidang strategis, AANZFTA ini dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam kerangka ASEAN+6 (ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru). Secara umum Australia memiliki rencana jangka panjang dalam rangka turut mendukung efektifitas implementasi AANZFTA ini, yaitu dengan terus berkonsultasi dengan sekertariat ASEAN serta pemerintah tiap negara dan secara aktif mendukung agenda dan program kerja dalam rangka pembangunan AANZFTA. serta melakukan serta memastikan industri dalam negeri dapat memaksimalkan keuntungan dari AANZFTA ini (www.dfat.gov.au/trade/agreements/aanzfta/pages/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement.aspx diakses pada 3 November 2016 pukul 11.48).

Pengesahan AANZTFA sendiri oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2011 sedangkan penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka AANZFTA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.166 Tahun 2011. dan diperbarui dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 011 Tahun 2013. Meskipun

AANZFTA disetujui oleh 11 negara di tahun 2009, Indonesia merupakan negara terakhir memberlakukan perjanjian dengan alasan menyesuaikan produk-produk dalam negeri untuk kemudian dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri (www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkpn_KAJIAN_publikasi_AANZFTA.pdf diakses pada 7 November 2016 pukul 01.15).

Beberapa data pendukung dari skripsi maupun jurnal yang kemudian menjadi referensi peneliti salah satunya adalah tinjauan dalam bentuk penelitian skripsi Abdi Tooy yang berjudul "Kepentingan Australia Dalam Kesepakatan Pembentukan *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) Tahun 2009". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Tahun 2012. Dalam skripsi tersebut menjelaskan alasan-alasan yang kemudian melatar belakangi keputusan Australia ikut serta dalam kerjasama ini. Kepentingan ekonomi-politik Australia didasari oleh kebijakan partai penguasa yang cenderung memfokuskan politik luar negerinya ke kawasan Asia Pasifik.

Persamaan dengan yang sedang peneliti kaji secara substansi yaitu, meneliti *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* dan implikasinya terhadap hubungan ekonomi politik negara yang terlibat beserta kebijakan yang diterapkan. Perbedaaannya yaitu, penelitian sebelumnya lebih terfokus pada kepentingan Australia ikut dalam kesepakatan pembentukan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*. Sedangkan peneliti akan membahas dan mengkaji upaya-upaya kedua negara, hambatan, dan prospek dari kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

Penelitian selanjutnya yaitu membahas mengenai pengaruh AANZFTA terhadap peningkatan perdagangan Indonesia-Selandia Baru, tercantum dalam penelitian skripsi Johanes Mario Mary Hebry yang berjudul "Pengaruh AANZFTA (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*) Terhadap Peningkatan Perdagangan Indonesia-Selandia Baru" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Tahun 2016. Dalam skripsi tersebut peneliti berusaha untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Indonesia dalam perdagangan dan hubungannya dengan pasar bebas dan bagaimana perkembangan perdagangan Indonesia–Selandia Baru sehubungan dengan perdagangan bebas AANZFTA.

Persamaannya dengan yang peneliti kaji yaitu, membahas mengenai diterapkannya AANZFTA terhadap peningkatan perdagangan produk Indonesia. Perbedaannya yaitu, terletak pada variabel judul yang akan dibahas. Johanes Mario Mary Hebry fokus membahas mengenai pengaruh AANZFTA terhadap peningkatan perdagangan Indonesia-Selandia Baru. Sedangkan peneliti membahas upaya-upaya kedua negara, hambatan, dan prospek dari kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

Peneliti juga mengambil referensi dari jurnal Serian Wijatno, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara yang tercantum dalam Jurnal Ekonomi, vol.14 No. 2 Tahun 2009 berjudul "Implikasi Perjanjian ASEAN-Australia/New Zealand FTA (AANZFTA) Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia". Jurnal tersebut secara garis besar membahas tentang bagaimana perjanjian dalam AANZFTA berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Persamaannya dengan penelitan yang peneliti kaji yaitu, membahas mengenai diterapkannya AANZFTA terhadap perekonomian Indonesia. Wijatno membahas mengenai kehawatiran ketahanan ekonomi Indonesia yang rentan apabila gagal mengimplikasi perjanjian AANZFTA. Dengan segala polemik menyangkut penerapan kebijakan. Perbedaaannya, peneliti mengkaji upaya-upaya kedua negara, hambatan, dan prospek dari kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

Referensi selanjutnya peneliti ambil dari jurnal Desti Anandya Fajri, Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau yang berjudul "Kepentingan Selandia Baru Melakukan Kerjasama Perdagangan Bebas dengan Indonesia Dalam Kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015". Jurnal tersebut secara garis besar membahas kepentingan Selandia Baru untuk dapat memasarkan *Dairy Product* domestik di Indonesia serta memperoleh keuntungan dari segi politik dikarenakan kedekatan hubungan semenjak tahun 1960.

Persamaannya dengan penelitan yang peneliti kaji yaitu, membahas implikasi pasar bebas AANZFTA terhadap hubungan perdagangan luar negeri Indonesia. Desti Anandya membahas mengenai adanya kekhawatiran dan ancaman terhadap industri dalam negeri Indonesia dan kesejahteraan masyarakat pelaku ekonominya yang rentan apabila tidak mampu bersaing dalam pasar bebas AANZFTA. Perbedaaannya adalah peneliti mengkaji mengenai upaya-upaya kedua negara, hambatan, dan prospek dari kerjasama perdagangan sektor non-

migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk kemudian mengangkat judul **"Kerjasama Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Australia dalam Kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2012-2015.**

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung dengan beberapa mata kuliah Hubungan Internasional, antara lain yaitu**:**

1. Analisis Politik Luar Negeri, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai politik luar negeri suatu negara dalam melakukan hubungan kerjasama. Dalam hal ini kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.
2. Diplomasi dan Negosiasi, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memahami sebuah kerjasama bilateral, dalam hal ini kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.
3. Ekonomi Politik Internasional, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memahami sebuah hal fundamentalis dari terbentuknya suatu negara yaitu mengadakan kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebijakan politik didalamnya, dalam hal ini

kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

4. Hubungan Internasional di Australia dan Pasifik, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam mempelajari dan mengamati hubungan internasional di kawasan pasifik, terlebih adanya kegiatan pasar bebas. Dalam hal ini kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah penelitian diatas, maka peneliti membagi masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan kajian yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu, **"Bagaimana Kerjasama Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Australia Dalam Kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015?".**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan tiga pertanyaan yaitu:

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan kedua negara untuk mengoptimalkan kerjasama perdagangan non-migas dalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015?.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kedua negara dalam perdagangan sektor non-migas pasca diterapkannya *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015?.
3. Sejauh mana prospek kerjasama perdagangan sektor non-migas antara Indonesia-Australia didalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015?.

1.2.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan lingkup kajian yang akan dilakukan, peneliti membatasi penelitian dalam kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2009-2015, dengan alasan tahun 2009 Indonesia ikut merancang aturan dalam AANZFTA, serta pengurangan tarif dan hambatan mulai diberlakukan bertahap terutama pada produk non-migas dan tahun 2015 dipilih sebagai acuan data terakhir yang akan dimuat dalam skripsi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana perkembangan kerjasama perdagangan sektor non-migas antara Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian membahas kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk dapat mengoptimalkan kerjasama perdagangan non-migas dalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apa saja hambatan-dari kerjasama perdagangan sektor non-migas Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015.
4. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa sejauh mana prospek kerjasama perdagangan sektor non-migas antara Indonesia-Australia didalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) 2009-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti. Dan diharapkan juga dapat berguna untuk menambah pandangan mengenai konsep yang dipergunakan dalam regionalisme, ekonomi politik internasional, dan hubungan internasional. Serta mengenai upaya, hambatan, dan prospek dari kerjasama perdagangan sektor non-

migas antara Indonesia-Australia dalam kerangka *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* (AANZFTA) 2009-2015.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Diharapkan juga dapat memberi kontribusi terhadap konsep-konsep regionalisme, ekonomi politik internasional, dan ilmu hubungan internasional antara Indonesia dengan Australia dalam kerangka pasar bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.